

Ketahanan Pangan, Nasionalisme dan Ketahanan Budaya¹

Agus Pakpahan²

Dan raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, dan tujuh tangkai yang hijau dan (tujuh tangkai) lain yang kering. Hai para pembesar, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku jika kamu dapat mengartikan mimpi". (Al Qur'an, 12: 43).

(Yusuf berkata, "Kamu bercocok tanam tujuh tahun sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. (Al Qur'an, 12: 47)

Kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit menghabiskan apa yang kamu sediakan itu kecuali sedikit yang kamu simpan. (Al Qur'an, 12: 48).

Pendahuluan

Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua melihat ketahanan pangan dalam konteks yang lebih luas, tidak sekedar melihatnya hanya dari sisi teknologi atau produksi atau sebatas lingkup *supply-demand* saja. Saya ingin mengajak kita semua memahami ketahanan pangan dari sudut pandang negara dan sekaligus pula dari kacamata budaya.

Saya melihat ketahanan pangan dari sudut negara mengingat bahwa negara kita ini didirikan dengan suatu cita-cita, dengan suatu idealisme bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan dan bahwa sudah menjadi tujuan bernegara untuk melindungi, menjamin dan memajukan rakyatnya mencapai tingkat kesejahteraan yang dicita-citakannya. Salah satu ukuran kesejahteraan yang menjadi tugas atau kewajiban negara untuk mewujudkannya adalah ketahanan pangan.

Banyak literatur baik berupa hasil penelitian, pendapat maupun dokumen-dokumen kebijaksanaan di bidang pangan dapat kita jumpai. Dewasa ini berkembang pula pemikiran atau pembahasan yang melihat bahwa pangan sebagai suatu kedaulatan, atau biasa dinyatakan dalam istilah kedaulatan pangan. Seminar ini pula mengambil tema kedaulatan pangan sebagai pokok bahasannya. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa memang kedaulatan negara akan sangat tergantung pada kemampuan negara menjamin seluruh rakyat terpenuhi kebutuhan pangannya. Namun demikian, pembahasan tentang ketahanan pangan yang ditinjau dari aspek nasionalisme dan budaya masih relatif jarang dibahas secara intensif.

Memang benar bahwa usaha untuk swasembada pangan sudah menjadi harapan sejak lama menjadi kebijaksanaan pemerintah. Bahkan ukuran keberhasilan suatu orde pemerintahan di Indonesia juga sering diukur oleh keberhasilannya dalam mewujudkan swasembada pangan. Pada saat Orde Baru memerintah, swasembada pangan juga menjadi sasaran pembangunan yang menempati urutan utama. Repelita demi Repelita dijalankan dengan seksama dan kita mencatat bahwa swasembada beras

¹ Makalah disampaikan pada Dies Natalis IPB, Bogor, 30 Oktober 2008.

² Deputy Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan.

dicapai pada tahun 1984. Masyarakat dunia, melalui FAO, memberikan penghargaan kepada Indonesia atas keberhasilan tersebut. Namun demikian, sejalan dengan perjalanan waktu, swasembada beras tersebut tidak dapat dipertahankan. Bahkan Indonesia mengalami menjadi negara pengimpor pangan yang jumlahnya cukup berarti dalam mempengaruhi situasi pasar pangan dunia. Walaupun produksi beras akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang berarti sesuai dengan data Badan Pusat Statistik, masih banyak kalangan yang bersikap pesimis terhadap situasi ketahanan pangan nasional ini. Bahkan di balik itu, media massa juga sering menyiarkan kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan seperti masih banyaknya anggota masyarakat yang mengalami busung lapar.

Artinya adalah bahwa masalah pangan masih menjadi topik perhatian utama bagi bangsa Indonesia. Dalam menatap masa depan, kita juga masih khawatir apakah negara bisa menjamin rakyatnya mendapatkan pangan secara layak pada Indonesia, misalnya, tahun 2050. Apabila dipandang dari kaca mata sumberdaya alam atau teknologi yang tersedia untuk menghasilkan pangan di dunia ini, maka mestinya masalah pangan mestinya bukan lagi masalah utama di era abad ke-21 ini. Namun demikian, pada kenyataannya, keberadaan teknologi dan sumberdaya alam ternyata tidaklah memberikan jaminan bahwa ketahanan pangan dapat diciptakan dengan sempurna. Bahkan, kita pun menyaksikan hal yang sebaliknya terjadi seperti halnya yang terjadi di benua Afrika atau belahan bumi lainnya yang menderita kekurangan pangan atau kelaparan yang mewabah. Naiknya harga pangan akhir-akhir ini, juga telah mendatangkan kekhawatiran bagi para pemikir dan pengambil kebijaksanaan di bidang pangan. Krisis ekonomi global yang terjadi saat ini juga dapat dipastikan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang seperti Indonesia dengan melambatnya tingkat pertumbuhan dan kemampuan masyarakat dalam berinvestasi di bidang pangan serta menurunnya daya beli konsumen sebagai dampak langsung dari menurunnya tingkat pendapatan. Lebih jauh lagi, krisis global juga mengajarkan kepada kita semua bahwa menggantungkan diri untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dari negara lain juga sangat mengancam kedaulatan negara kita.

Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kembali kita memahami dan mendalami bahwa globalisasi memang memberikan manfaat, tetapi juga kita harus menyadari dan menaruh perhatian yang mendalam bahwa globalisasi juga memberikan sisi buruk dan membahayakan. Di antara keburukan itu terletak pada kondisi apabila kita menggantungkan diri kepada negeri lain dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat kita. Kemandirian pangan atau swasembada pangan atau apa saja namanya kembali perlu menjadi perhatian kita semua. Kedaulatan pangan dalam pengertian ancaman berat bagi negara apabila negara ini tidak mampu memenuhi pangan rakyatnya adalah mejadi tema kedaulatan negara juga.

Apabila kedaulatan pangan identik dengan kedaulatan negara, maka jelas pangan menjadi persoalan negara. Selama ini kita hanya sering menyadari bahwa kedaulatan negara itu hanya menjadi pokok bahasan dalam pertahanan negara yang dilihat dari sudut pandang pertahanan militer. Pandangan ini sangatlah keliru mengingat tentara yang hebat sekalipun tidak akan bisa bertempur atau bertahan lama di medan pertempuran apabila tidak didukung oleh logistik pangan yang memadai. Karena itu, kedaulatan pangan adalah hal yang primer, yang tidak dapat digantikan

oleh hal lainnya, mengingat kehidupan itu ditentukan oleh persediaan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh rakyat.

Oleh karena itulah nasionalisme menjadi isme yang pokok untuk bisa dan kuat membangun ketahanan pangan nasional yang bisa dan kuat menciptakan negara kita ini sebagai negara yang berdaulat penuh. Kalau pandangan ini kita pegang maka ketahanan pangan menjadi prioritas. Kita melaksanakan ketahanan pangan sebagai prioritas apabila kita mampu menjalankan roda pembangunan dengan berani mengambil keputusan dan menjalankan tindakan bahwa hal lain yang bertentangan atau menghalangi pewujudan ketahanan pangan yang tinggi dikesampingkan atau ditunda terlebih dahulu. Apabila hal yang sebaliknya yang kita lakukan maka kita pada hakekatnya telah melakukan perbuatan yang tidak konsisten dengan tujuan mewujudkan kedaulatan negara kita secara penuh. Dalam hal ini kita perlu belajar dari Cina, bahwa negeri ini mampu memberikan kebutuhan pangan rakyatnya andaikan negeri ini mengalami peperangan selama 10 tahun. Dewasa ini kita mengartikan ketahanan pangan dalam dimensi waktu yang sangat pendek, misalnya ukuran stok beras dalam jangka waktu bulanan saja.

Apa yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan negara pada dasarnya dikondisikan oleh apa yang menjadi keyakinan di dalam dada kita, apa yang menjadi perhatian dan pikiran kita dan isi perasaan kita sebagai bangsa dan negara yang berdaulat. Ini adalah suatu budaya. Kalau budaya kita masih seperti "budaya ayam kampung", *koreh-koreh cok* kata orang Sunda, maka walaupun sang induk bisa memberikan makan bagi anak-anaknya, dimensi waktu ketahanan pangan kita sangatlah pendek. Karena itu, sedikit kemarau panjang saja kita alami, atau sedikit banjir saja melanda sawah-sawah kita, atau ada wabah hama-penyakit yang cukup berarti, ketahanan pangan kita sudah ambruk. Karena itu, menjadi sangat penting bagaimana kita membangun budaya ketahanan pangan yang sangat panjang dimensi waktunya, sehingga kedaulatan negara kita tidak berumur musiman.

Sumber Pangan Identik dengan Jawa

Tidaklah berlebihan apabila kita mengatakan bahwa konfigurasi geografis produksi pangan nasional ditentukan oleh keberhasilan pulau Jawa dalam menghasilkan pangan selama ini. Kondisi ini sangatlah paradoksal mengingat luas Jawa hanya sekitar 7 % dari luas wilayah Indonesia. Selain itu, Jawa juga sudah menjadi kota pulau dengan penduduknya yang sangat padat. Karena itu pertanian pangan di Jawa dicirikan oleh struktur pertanian yang didominasi oleh petani gurem dengan luas lahan kurang dari satu hektar. Kalau dibandingkan dengan para petani di Eropa atau di Amerika Serikat, maka sebutan untuk petani kita bukanlah *farmer* tetapi *peasant*.

Apa artinya dari struktur geografis pangan seperti itu? Implikasinya adalah bahwa ketahanan pangan kita dalam jangka panjang sangatlah mengkhawatirkan. Jawa tentu tetap penting atau bahkan pertanian di Jawa perlu dilindungi sebelum kita berhasil dengan baik membangun lumbung-lumbung pangan yang cukup menjamin keberhasilannya di luar Jawa.

Selama ini yang berkembang dan cukup dominan adalah bahwa luar Jawa sebaiknya diperuntukkan untuk menghasilkan komoditas ekspor seperti perkebunan. Karena itu, peningkatan luas areal perkebunan, khususnya kelapa sawit, terjadi sangat

cepat. Dalam setahun bisa meningkat jutaan hektar. Sebaliknya, peningkatan luas areal lahan pertanian pangan di Indonesia dapat dikatakan perkembangannya kurang berarti. Bahkan sebaliknya juga yang terjadi, yaitu konversi lahan sawah sangat pesat. Pengembangan lahan-lahan perkebunan bukan berarti tidak penting, tetapi kita perlu menaruh perhatian terhadap pengembangan areal pangan, termasuk di dalam areal perkebunan itu sendiri. Secara ekologis maupun ekonomi pola tanam yang sifatnya monokultur adalah tidak baik. Karena itu kita perlu mewajibkan para pengusaha perkebunan menggunakan lahannya untuk menghasilkan komoditas pangan juga. Bahkan perlu ditetapkan suatu quota, misalnya dari setiap 10.000 ha areal perkebunan sawit perlu dihasilkan minimal 20.000 ton padi, misalnya. Dengan demikian, dari setiap juta hektar areal bukaan baru akan dihasilkan dua juta ton padi. Setelah sinar matahari terhalangi tajuk pohon kelapa sawit maka diwajibkan juga diusahakan tanaman pangan yang tahan naungan, misalnya sejenis umbi-umbian atau talas.

Dengan model pendekatan seperti itu, yang dilandasi oleh rasa nasionalisme bahwa negara ini harus memanfaatkan setiap jengkal tanahnya untuk membangun ketahanan pangan nasional, maka kita akan sampai pada faham kedaulatan pangan menjadi tugas siapa pun yang mendapatkan hak dari negara untuk memanfaatkan lahannya. BUMN Perkebunan dan Perhutani sudah mencoba untuk mewujudkan hal ini dan akan terus ditingkatkan.

Dalam konteks Jawa-Luar Jawa ini kita sering juga menyaksikan bahwa kedua hal tersebut diletakkan pada posisi yang saling bertentangan. Misalnya, untuk apa mendukung pertanian pangan yang dihasilkan di Jawa apabila mengimpor pangan dari negara lain lebih murah. Untuk seorang individu cara berpikir ini tentu dapat dikatakan tepat. Tetapi, untuk kepentingan nasional cara pandang ini berbahaya, mengingat cara pandang ini keluar dari semangat dan cita-cita bernegara. Perlu saya sampaikan bahwa apa yang saya katakan itu kita menekan rakyat untuk membeli pangan yang lebih mahal. Kalimat di atas perlu ditafsirkan bahwa konsumen perlu mendapatkan harga pangan yang wajar karena itu sistem produksi pangan di Jawa harus diperbaiki andaikan sekarang masih lebih mahal, atau perlu juga diperiksa jangankan-jangan sistem distribusinya yang mahal mengingat infrastruktur pertanian di Jawa kondisinya buruk, atau harga pangan menjadi mahal sebagai akibat dari adanya berbagai pajak atau pungutan dalam setiap mata rantainya sebelum sampai di konsumen.

Pandangan di atas juga perlu ditafsirkan bahwa kita harus lebih serius lagi membangun pertanian pangan di luar Jawa agar tekanan terhadap Jawa menurun di satu pihak dan agar potensi ekonomi di luar Jawa juga berkembang. Dengan kata pertanian pangan juga tidak harus ditafsirkan sebagai membangun sawah untuk menanam padi, melainkan untuk membangun tanaman pangan apa saja sesuai dengan kondisi khas setiap wilayah yang akan dibangun.

Nasionalisme sebagai Fondasi

Nasionalisme sering sekali hanya diartikan sebagai faham politik. Memang benar ia sebagai faham politik negara sebagaimana tercantum dalam Pancasila, tetapi implikasi dari faham ini sangatlah luas. Negara-negara lain yang berhasil dalam pembangunannya dapat dipastikan memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Hal ini bukan hanya berlaku di Timur seperti dicontohkan oleh Cina, Jepang dan Korea

Selatan, tetapi juga terjadi di Barat. Pertanian mereka kuat karena rasa nasionalismenya yang kuat. Karena itu ketahanan pangan mereka juga kuat sekali.

Nasionalisme itu diwujudkan dalam praktek pembangunan nasionalnya. Semua negara yang memiliki pertumbuhan ekonominya yang tinggi dicirikan oleh pertumbuhan produktivitas pertaniannya yang tinggi. Pertumbuhan produktivitas pertanian yang tinggi itu pasti tidak datang sendirinya atau jatuh dari langit begitu saja. Pertumbuhan produktivitas pertanian pasti terjadi karena memang pertanian menjadi prioritas dalam pembangunan negaranya. Tidak seperti halnya dengan luas areal, pertumbuhan produktivitas adalah hasil dari bekerjanya produk akal-budi manusia seperti ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, organisasi, sistem politik dan lain sebagainya yang menempatkan pertanian pada posisi yang terhormat. Tentu hal ini lahir sebagai akibat dari isme yang dinamakan nasionalisme yang membuat kedaulatan negaranya utuh dan penuh karena mereka tidak sangsi lagi akan kebutuhan pangan rakyatnya.

Nasionalisme juga mewarnai nilai-nilai yang dianut oleh rakyat di negara yang bersangkutan dalam pola konsumsi pangannya. Walaupun promosi pangan yang berasal dari negeri asing gencar dilaksanakan, selain kebijaksanaan negara melindungi produk lokal atau nasional negerinya, mereka sebagai konsumen juga sangat loyal dengan produk mereka sendiri.

Apa yang terjadi di Indonesia cukup mengawatirkan. Peningkatan pendapatan masyarakat di Indonesia ternyata lebih banyak mendorong ke belanja pangan berbahan baku terigu dengan elastisitas pengeluaran pangan berkisar antara 0.44-0.84 %. Artinya, untuk setiap peningkatan pendapatan 1 %, minimal 0.44 % dibelanjakan untuk pangan yang dibuat dari terigu (Fabiosa, 2006).³ Hal ini menandakan bahwa para pengusaha di pasar global telah berhasil mengubah budaya pangan orang Indonesia dengan berbagai caranya sehingga makanan tradisional sudah terancam oleh jenis makanan yang bahan bakunya diimpor dan dengan jenis pangan olahan yang berbeda pula dengan kebiasaan sebelumnya. Kita tidak menyadari atau bahkan kita tidak memikirkan cukup serius bahwa kalau hal ini terus mengerosi alam pikiran rakyat Indonesia, maka pada akhirnya nanti negeri kita ini hanyalah menjadi tujuan pemasaran dari sisa-sisa makanan mereka mengingat pangan sifatnya adalah residual market. Saya pikir, hal ini terjadi karena rasa nasionalisme kita cukup lemah.

Diversifikasi Pangan sebagai Alat Utama Ketahanan Pangan

Sejarah pangan sama lamanya dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Mulai dari berburu, meramu, perladangan berpindah hingga pertanian menetap (*agriculture*) dan pertanian modern sebagaimana yang berkembang saat ini merupakan proses evolusi segala upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Lowdermilk (1948)⁴ bahkan menunjukkan bahwa dalam proses pencarian upaya pemenuhan kebutuhan pangan itu, manusia bukan hanya mendapatkan sumber pangan tetapi juga meninggalkan berbagai jenis kerusakan alam seperti gurun pasir atau kota mati.

³ Fabiosa, 2006. *Westernization of the Asian Diet: The case of rising wheat consumption in Indonesia*.

⁴ Lowdermilk, C.W. 1948. *Conquest of the Land Through Seven Thousand Years*. USDA. Lowdermilk menguraikan bahwa perkembangan peradaban (pertanian) di Syria mewariskan sekitar satu juta hektar lahan yang hancur akibat erosi tanah, hancurnya hutan di Lebanon, dan kota-kota yang hilang karena erosi tanah yang telah menimbulkannya (kisah Hundred Dead Cities).

Perkembangan peradaban yang didukung oleh keberhasilan manusia memenuhi kebutuhan pangannya tersebut ternyata menghasilkan kenyataan bahwa manusia semakin tergantung pada satu atau dua jenis tanaman utama saja, khususnya terdiri dari kelompok sereal. Masyarakat Asia sangat tergantung pada padi (beras) dan masyarakat Barat sangat tergantung kepada gandum (wheat). Tanpa kedua jenis makanan ini seolah-olah "kiamatlah sudah dunia ini", walaupun alam ini memberikan berbagai jenis makanan yang nilai kandungan bahan kimianya dapat mencukupi kebutuhan gizi bagi manusia.

Wadley dan Martin (1993)⁵, antara lain, menjelaskan mengapa kita ini sangat tergantung kepada kedua jenis pangan tersebut atau bahkan dapat dikatakan "ketagihan". Menurut Wadley dan Martin (1993) manusia tergantung (ketagihan) kepada padi dan gandum karena di dalam kedua jenis makanan ini terdapat *exorphin* yaitu sejenis *morphin*.

Ketergantungan ini merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya pemusatan pangan dari banyak jenis pada saat tahapan evolusi manusia sebagai pemburu dan peramu ke hanya sedikit jenis pangan pokok pada era pertanian sekarang ini. *Economies of scale* dalam sistem produksi pangan yang sangat besar untuk padi dan gandum ini didukung oleh *economies of scale* yang sangat tinggi pula dalam hal konsumsi pangan. Bahkan dapat dikatakan bahwa "at any cost" kebutuhan akan padi atau gandum ini diupayakan untuk memperoleh kepastian akan tersedianya beras karena tanpa adanya beras ini (untuk kita), seolah-olah Indonesia terancam akan "ambruk".

Di sinilah letaknya makna ketahanan pangan yang utama, yaitu bagaimana kita bisa dan kuat mentransformasi sesuatu yang telah membudaya, yaitu kebiasaan atau *habit* dari sebagian besar masyarakat kita yang sangat tergantung kepada beras dalam memaknai sumber utama pangan kita, ke arah pola pangan yang bukan hanya hemat dan waspada sebagaimana diajarkan oleh Nabi Yusuf a.s. tetapi juga bersumber dari keanekaragaman pangan (diversifikasi pangan) yang telah disediakan oleh alam di sekitar kita. Jadi, persoalan mendasarnya bukanlah berada dalam ruang-lingkup teknis, melainkan berada dalam alam budaya kita.

Arah dan Kecenderungan Budaya Pangan

Sesuatu dikatakan sudah membudaya apabila kita mengerjakannya tanpa didahului oleh pertimbangan-pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu. Hal itu terjadi karena ia sudah menjadi hasil artikulasi dari hasil evolusi pemikiran, perasaan dan proses kognitif lainnya dalam masyarakat yang sudah berlangsung lama. Hal yang sama juga dengan pangan, bahwa kita setiap hari makan nasi adalah karena memang makan nasi itu sudah menjadi bagian dari budaya pangan kita.

⁵ Wadley, G dan A. Martin. 1993. The origins of agriculture ? a biological perspective and a new hypothesis. *Australian Biologist* 6: 96 - 105, June 1993

Karena itu bukanlah hal yang sederhana dalam membangun ketahanan pangan ini. Vaclav Smil (1993) menunjukkan sebenarnya lebih murah upaya meningkatkan ketahanan ini melalui perubahan budaya, khususnya dalam mengubah kebiasaan makan, dengan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap satu atau dua jenis tanaman saja, dibandingkan dengan meningkatkan supply sarana dan prasarana produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang terus meningkat.⁶

Dalam proses perubahan budaya pangan ini, para analis ekonomi pangan banyak melihat faktor pendapatan sebagai peubah utama. Permintaan terhadap keanekaragaman konsumsi pangan adalah elastis terhadap perubahan pendapatan. Namun demikian, peningkatan pendapatan masyarakat di Indonesia ternyata lebih banyak mendorong ke belanja pangan berbahan baku terigu. Budaya pangan yang terbangun ternyata telah memperlemah ketahanan pangan kita. Akibatnya, kedaulatan pangan melemah karena kita tergantung pada pasokan pangan dari negara lain. Ini sama saja dengan sengaja kita mengancam atau memperlemah kedaulatan negara sendiri.

Apa yang harus dikerjakan walaupun memenuhi kebutuhan pangan itu lebih murah melalui perubahan budaya pangan (Smil), tetapi ternyata bahwa kecenderungan budaya pangan kita mengarah ke budaya pangan Barat (Fabiosa)?

Bukan Sekedar Persoalan *Supply* dan *Demand* saja Melainkan Persoalan Strategi Budaya

Dampak globalisasi memang luar biasa terhadap perubahan budaya masyarakat di seluruh belahan muka bumi ini. Bahkan Friedman (2005) sudah menyebutnya: *The World Is Flat*, sebagai ungkapan bahwa dampak globalisasi itu sudah membuat dimensi spatial sebagai persoalan besar. Karena itu, apabila pandangan ini kita terima dan kita pegang maka sudah tidak menjadi persoalan lagi apabila kita mengganti pangan kita sehari-hari nasi menjadi roti yang dibuat dari terigu.

Terus terang saja, penulis melihat bahwa *The World Is Flat* adalah benar adanya bagi bangsa-bangsa di Negara maju. Namun tidaklah demikian bagi Negara-negara miskin seperti Indonesia, dimana sama atau lebih pangsa pengeluaran untuk belanja pangannya lebih dari 50 % (hidup ini hanya untuk mencari makan). Dalam "The 3rd world choice of teak or oak" (The Jakarta Post, 2 Agustus 2007) (Lihat Kotak 2) penulis menyampaikan pemikiran bahwa kita harus melihat persoalan globalisasi ini dengan kritis. Di antaranya adalah kita harus bisa dan kuat beradaptasi dengan lingkungan di mana kita berada, khususnya dalam membangun **budaya ketahanan pangan**.

Dalam membangun budaya ketahanan pangan ini penulis juga mengibaratkan bahwa kita lebih baik menjadi "bangsa ayam kampung" daripada menjadi "bangsa ayam broiler". (Lihat Kotak 1). Intinya adalah bahwa perubahan budaya pangan itu perlu dimulai dengan perubahan sikap mental yang tidak terpisahkan dengan nilai-

⁶ Vaclav Smil. 1993. *Global Ecology: Environmental change and social flexibility*. Routledge, London

nilai nasionalisme, persatuan bangsa dan kesejahteraan sosial. Hal ini merupakan titik awal dalam membangun ketahanan pangan kita ke depan.

Kotak 1:

Busung Lapar, Ayam Kampung, dan Pohon Jati

Agus Pakpahan

"Siapa yang lebih pintar, ayam kampung atau manusia?" kakek saya bertanya. "Kalau manusia tidak mampu menghidupi dirinya, ayam kampung lebih pintar dari manusia," kakek saya menjawab pertanyaannya sendiri.

Pertanyaan dan jawaban kakek saya itu membuka pikiran saya belakangan ini. Mengapa kita mengalami busung lapar di era pembangunan, era kemerdekaan, dan era modern ini? Bukankah teknologi dan ilmu pengetahuan sudah semakin maju? Bukankah kita semua, dari Jakarta hingga desa-desa, sudah hafal betul kata reformasi, demokrasi, atau pertumbuhan ekonomi serta otonomi daerah?

Kemudian terbayanglah kehidupan di desa saya, lebih dari 40 tahun yang silam. Rasanya saya ingat betul, kami anak-anak desa ketika itu tidak pernah mengalami kelaparan atau busung lapar. Mengapa? Karena kami adalah "ayam kampung". Kami bisa mencari sumber kehidupan di alam-lingkungan kami. Mau ikan? Tinggal cari di sawah: ada gabus, mujair, beunteur, belut, betok, lele, dan macam lainnya. Mau daging burung air (sawah): burung pecuk, beker, kuntul, dan lain-lain, asal pandai menyumpit. Di pekarangan: ada ganyong, talas, singkong, hui, dan umbi-umbian lainnya. Sayuran bukanlah halangan. Di kebun, juga tersedia macam-macam. Bahkan gangsir dan turaes pun sedap disantap. Kami menikmati itu karena memang alam lingkungan masih baik dan "sekolah masyarakat" mengajari kami menjadi "ayam kampung", yang mampu menghidupi diri sendiri.

Apakah kita sekarang sudah menjadi "ayam broiler", yang hanya bisa hidup kalau ada yang memberi makan? Bahkan jenis makanannya pun menjadi sangat terbatas, sebatas yang dibuat pabrik, dengan menu dan takaran yang sudah ditentukan. Masih bagus kalau kita menjadi "ayam broiler" dan ada yang memberi makan. Kalau hanya membuat kita menjadi bergantung pada nasib yang ditentukan pihak lain, kondisi ini jelas membahayakan. Kita rasanya menjadi lebih bodoh dari "ayam kampung" kalau ternyata kita memang tidak mampu menghidupi diri kita sendiri.

"Ayam kampung" adalah suatu ilustrasi karakter, spirit, jiwa, dan kemampuan untuk bisa hidup sendiri dari alam tempat kita hidup-berdiri. Masyarakat "ayam kampung" adalah masyarakat yang rajin dan tahu bagaimana mengatur diri sendiri. Pagi hari ia bernyanyi, keluar dari kandang, mengasuh anak-anaknya sambil mencari makan. Di sore hari, mereka kembali ke kandang sendiri, tak merepotkan. Begitulah "ayam kampung", yang karakternya sering kita lupakan, padahal sangat penting sekali untuk diteladankan.

Saya sering bertanya kepada teman-teman dalam berbagai kesempatan berdiskusi: "Apakah sistem pekerjaan, pendidikan, atau pergaulan dalam masyarakat selama ini telah membuat kita terperangkap dalam perangkap kemandirian hidup? Apakah kultur dan struktur sosial yang hidup dan berkembang selama ini membuat kita lupa pada kekuatan diri sendiri dan lingkungan tempat kita berdiri?" Saya membayangkan bagaimana anak-anak sekarang sangat bergantung pada mi instan atau Chiki dan sudah lupa pada goreng oncom dan serabi.....

Kotak 2:

The 3rd world choice of teak or oak

The Jakarta Post , Jakarta | Thu, 08/02/2007 12:26 PM | Opinion

Agus Pakpahan, Jakarta

It is not only historical or political classifications of people on earth that divide nations or people into two categories, namely developed and developing countries. In fact, what we now call developing countries were termed "third world" countries in the past. It is implied by itself in that terminology that our culture is a third rate culture. This status had been given by developed nations and we consciously or unconsciously accepted such a label.

Entering the end of the 20th century, nations in the third world, especially in East Asia, showed a tremendous change in their economic development. Again, the developed nations called such positive trend the "Asian Miracle". It was showed that what had been reached by East Asian countries was only a miracle, namely the economic progress was achieved not as a result of intelligence and hard work but was the result of a power beyond people's capabilities. Again, we were happy with such assessment

Developed countries with 500 years of "high" culture see East Asian countries' economic progress as a challenge or a threat to them. Asian values have been deeply studied and have been seen as the cause behind such rapid progress in socio-economic development. The consistent high economic growth experienced by China, which has reached more than two digits, is no longer viewed as a miracle but as a result of China's strategy in coping with the globalization process.

If we view the basic foundations of socio-economic development is societal values then we will be able to see that there are some truths in the positive aspects of Asian values that may have their roots in Chinese culture.

The root is the Chinese way of seeing the world. They see their culture as not inferior to other nations' cultures. The Koreans and the Japanese adopted the same attitude towards their cultures. We are not talking about cultural superiority. What I mean here is that a strategy of economic development should be seen as cultural strategy, namely the strategy that takes benefits from people' ways of thinking, feeling and believing. The basic argument is that what people can be or can do is rooted in what they believe, feel and think. This is part of the culture.

We have our own ways of belief, feeling and thinking but through our colonial history we have been "educated" to think that our culture, our ways of thinking, feeling and believing are inferior. We have been told and taught that the right way to develop our welfare or nation is to follow what has been experienced in Western nations.

As a result, we cannot know which one is suitable for us and which one is not. So our minds are confused. We think that changing from rice to wheat is better to do and that by doing that we feel we are becoming a part of the modern nations. We perceive that privatization is the only right strategy to build up the business sector and we do not realize that the real issue behind privatization or selling our assets to foreigners is that we are not able to apply the best use of our resources ourselves.

The basic problem is not in the resources we want to sell but lies in our lack of capability. Therefore, the best solution is not selling our strategic resources but to develop our capabilities -- what we can be and can do. Tata India, for example, has chosen the opposite strategy, namely buying Tetley, a British tea company, as a symbol of a winning strategy. Tata bought Tetley not because it had excess money, but because it has the best people in tea. This is a culture-based strategy that is incorporating societal values into business and practices.

The statement of *The World Is Flat* (Friedman, 2005) is similar to the message of behind "Asian Miracles" and third world nations, namely, Friedman is putting a new label on the world we share together. It means that all the space on this globe has been conquered by the developed nations. Or, it means that globalization has made the whole world belong to the developed nations.

In other words, the developed nations have been successful in making a one-world culture -- the global way of thinking, feeling and believing that is dictated by the developed nations. It is a realization of what Isaiah Berlin said, that freedom for the pike is death for the minnow. Or, in this case, our culture.

The last statement can be viewed as an exaggeration. But, it could be possible if there is no awareness of all nations on this earth to protect or to care for our cultural diversities. The sustainability of people in this globe will be determined by our success in preserving the world's cultural diversities in a positive sense.

The teak and the oak "live, think, and believe" in their own ways. Tata, for example, is the teak that can make the best use of tea that grows in tropical regions. Malaysia, China or Japan had found their own "teak". Their ideology is one: Living together independently in nature but mutually in nurture. This is the requirement for sustainable peace and growing welfare.

As mankind, can we imitate the oak and the teak?

The writer is an agricultural economist who specializes in natural resources and institutional economics

Penutup

Persoalan pangan perlu ditempatkan sebagai persoalan negara dimana negara harus bisa dan kuat memberikan jaminan bagi seluruh rakyatnya agar dapat

memperoleh kebutuhannya. Ketahanan pangan merupakan dimensi primer dari ketahanan nasional. Karena itu ketahanan pangan menjadi mutlak dalam mewujudkan kedaulatan negara secara utuh dan penuh. Dalam mewujudkan ketahanan pangan menurut pemahaman ini maka nasionalisme menjadi fondasi dalam penyelenggaraan negara yang implementasinya menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas, yaitu hal-hal lain yang mengancam harus dibasmi dan hal-hal lain yang berada di bawahnya harus ditunda pelaksanaannya apabila hal tersebut bertentangan dengan tujuan ketahanan pangan.

Upaya untuk mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian pangan sudah lama dilaksanakan. Namun demikian, kekhawatiran bahwa ketahanan pangan akan mengganggu kedaulatan negara masih berkembang. Karena itu perlu dilakukan reinterpretasi dan penyempurnaan dari pola-pola yang dibangun selama ini.

Tidak ada cara lain untuk membangun ketahanan pangan kita, kecuali dengan melakukan revolusi kesadaran dan diikuti oleh gerakan nasional untuk menjadi "pohon jati", yang mampu hidup baik dan kuat dengan kualitas kayu istimewa, walaupun berada di tanah yang gersang dan keras. Inilah perubahan budaya ketahanan pangan yang harus diciptakan dengan landasan kokohnya nasionalisme.

C:\Users\BRII\Documents\ap tulisan\presentasi\Ketahanan Pangan sebagai Ketahanan Budaya.doc